### **BAB 1 PENDAHULUAN**

# 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah maka penyerahan pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelengaraan pemerintahan daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemeritah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Menurut (Mashun, 2006) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pecapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern. Teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data dan teknologi jaringan informasi (O'Brein, 2006). Menurut (Aji, 2005) informasi adalah data yang terolah dan sifatnya menjadi data lain yang bermanfaat dan biasa disebut informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan (Tjai Fung Jin, 2003). Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh (Wijana, 2007) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Wilkinson, 2000). Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kas pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing (Wahana Komputer, 2003), namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan struktur organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhiya kebijakan pimpinan. Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya (Raymond, 2004). (William S, 2000) Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyediakan keyakinan dan efisiensi operasi perusahaan dan kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada. Proses pengendalian intern organisasi terdiri dari lima elemen yaitu: lingkungan pengendalian, pengukuran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan. Pelaksanaan sistem pengendalian intern dapat efektif apabila ada komitmen diantara pihak-pihak yang terkait dalam organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok. Dengan komitmen dan sistem pengendalian intern yang baik maka akan tercipta organisasi atau perusahaan yang economy, efficiency dan effectiveness untuk menciptakan good coperate governance dalam institusi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2007) berpendapat bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja.

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan

keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif. Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara lain: (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala SKPD. Aspek-aspek dalam manajemen pembangunan daerah terwadahi dalam satu atau beberapa SKPD. Penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam sekretariat, pengawasan diwadahi dalam bentuk inspektorat, perencanaan diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, sedangkan aspek pelaksana urusan daerah diwadahi dalam dinas daerah. Kinerja SKPD menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD), bisa meliputi Badan, Dinas, Kantor dan unit lainnya.

Pemerintah Kabupaten Situbondo berkomitmen tinggi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo. Hal ini didukung oleh semua Organisasi Perangkat Daerah yang turut hadir pada penilaian sakip kali ini. Lebih lanjut Bupati juga memaparkan hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, bahwa semua program kegiatan OPD harus fokus dan berhubungan langsung dengan pencapaian visi misi Kepala Daerah Program kegiatan OPD harus bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan berorientasi kepada hasil atau outcame bukan sekedar berorientasi pada penyelesaian SPJ. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang digulirkan oleh pemerintah saat ini.

Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan standar kualitas baik, namun informasi pada Laporan Kinerja yang disajikan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk berbagai pengambilan keputusan manajemen, terkait penilaian kinerja, perbaikan perencanaan dan sebagainya. Memiliki aplikasi untuk memantau perkembangan capaian kinerja, namun aplikasi tersebut belum terintregasi, belum terpadu. Aplikasi ini akan mendorong mekanismen pengumpulan data yang semakin dapat diandalkan serta meningkatkan kualitas laporan kinerja, agar Inspektorat Kabupaten Situbondo atau Tim evaluasi melakukan evaluasi akuntabilitas OPD dalam rangka memastikan OPD untuk lebih

akuntabel terhadap kinerjanya serta memberikan rekomendasi yang mampu membangun unit yang berbudaya kinerja.

Tabel 1.1 Nilai SAKIP Kabupaten Situbondo dari Tahun 2015-2018

Tahun	Nilai SAKIP
2015	50,2
2016	51,2
2017	61,96
2018	70,88

Sumber: Laporan Kinerja 2018 Kabupaten Situbondo

Dari tabel diatas, hal ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dinyatakan kurang baik dan perlu pembenahan, oleh karena itu dilakukannya pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat menggambarkan bagaimana kinerja pemerintahan untuk menunjukkan pencapaian hasil yang dicapai. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi informasi.

Di pemerintahan Kabupaten Situbondo, pengawasan secara intern di masing-masing instansi dilakukan oleh atasan langsung dan oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo dengan melakukan pemeriksaan reguler. Hasil pemeriksaan ditinjau dari Sistem Pengendalian Intern. Mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan masih ditemukan kelemahan pada bidang pengawasan terutama pengawasan atasan langsung kepada bawahan di Pemerintahan Kabupaten Situbondo sehingga ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini mengambil judul "Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo)".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Adanya kelemahan teknologi informasi dan pengendalian internal kinerja instansi pemerintah di SKPD Kabupaten Situbondo dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.

### 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana cara meningkatkan teknologi informasi dan pengendalian internal kinerja instansi pemerintah di SKPD Kabupaten Situbondo?

### 1.4 Pertanyaan Penelitian

- 1. Apakah Teknologi Informasi akan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah?
- 2. Apakah Pengendalian Internal akan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah?

# 1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bukti empiris pada kepustakaan akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pengaruh teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh serta menjadi pembanding untuk membandingkan teori dan fakta.

### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi atau acuan untuk menindak lanjuti penelitian-penelitian serupa dan menambah kajian pustaka dibidang sistem informasi akuntansi.

# c. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak SKPD, yaitu sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja.

